



Buletin Parlementaria

Nomor 967/II/VII/2017 • Juli 2017

7TH
INDONESIA
KERJA
BERSAMA



**Halal Bihalal Momen
Tingkatkan Keharmonisan
Pimpinan dan Karyawan DPR**

**Pemindahan Ibukota
Terkesan Gegabah**

**Pansus Angket KPK
Gali Informasi
dari 33 Napi Koruptor**

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN

Pansus Angket KPK Gali Informasi dari 33 Napi Koruptor

Pansus Angket KPK menggali informasi dari 33 Napi Koruptor yang ada di LP Suka Miskin.

Saat peninjauan, Pansus Hak angket KPK menemukan bahwa para terpidana tindak korupsi Tipikor yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jabar kerap menerima teror, intimidasi, dan kesewenang-wenangan, bahkan, hak privat keluarga mereka juga dilanggar.

Ketua Pansus Angket KPK DPR RI Agun Gunanjar sudarsa mengatakan, pihaknya banyak memperoleh fakta dan data penting seputar warga binaan LP Sukamiskin yang dahulu pernah menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Ada terjadi intimidasi terjadi pelanggaran hak azazi bahkan pelanggaran yang sifatnya private keluarga dan sebagainya itu semua mereka ungkapkan dan mereka bertanggung jawab atas kesaksiannya. Bahkan mereka pun siap dikonfrontir suatu saat Apabila mengundang mereka untuk dihadirkan sebagai saksi dalam proses penyelidikan,”

Ujar Agun Gunanjar saat peninjauan ke LP Sukamiskin, Bandung, Kamis, (6/7).

Agun masih merahasiakan siapa saja narapidana kasus tipikor yang telah menerima perlakuan buruk tersebut. Pansus akan mengkaji kembali kesaksian para narapidana itu dan memanggilnya ke forum rapat Pansus Angket KPK. “Kita tidak ingin membuat sensasi, tidak ingin membuat hal-hal yang tidak memiliki data dan fakta yang cukup. Tidak juga membuat opini yang semakin tidak baik. Yakinlah ini kesempatan terbaik buat kita. Ini kesempatan terbaik buat masyarakat seluruh Indonesia untuk tidak lagi berpikir curiga,” tegasnya.

Ditegaskan Agun, kehadiran pansus ini untuk memberi jaminan perlindungan dan hak asasi yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Pansus menempatkan para narapidana tipikor itu sebagai warga negara yang memang sedang menjalani hukuman pidana. Selain meminta keterangan sejumlah narapidana tipikor,

pansus juga meminta keterangan Kalapas Sukamiskin dan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM.

Beberapa narapidana tipikor yang terlihat di LP Sukamiskin adalah OC Kaligis, Akil Mochtar, I Putu Sudiartana, Rudi Rubiandini, Taufan Tiro, Budi Supriyanto, dan Tubagus Chaeri Wardana. Secara resmi pansus mendapat pengakuan dan testimoni yang ditandatangani langsung para narapidana tipikor. Data jumlah narapidana tipikor di Indonesia dan siapa saja yang sudah membayar uang denda dan ganti rugi sudah dipegang pansus.

“Jangan lagi ada kecurigaan. Kita harus saling hormati. Itikad pansus ini baik untuk menegakkan sebuah kebenaran. Dan yang menguji itu rakyat di lembaga parlemen yang sangat terbuka. Tidak akan ada yang dirahasiakan. Kami ingin melakukan prosesnya dengan terukur, transparan, akuntabel, dan partisipatif,” kilah Agun. ■

(mh/sc) foto: eka hindrahr



Tim Kunspek Pansus Angket KPK dipimpin Ketua Pansus Angket KPK DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa saat berkunjung ke LP Sukamiskin, Bandung, Kamis (06/7)



Taufik Kurniawan Ajak Masyarakat Introspeksi Diri Menuju Pribadi Unggul

Seluruh umat muslim merayakan Idul Fitri 1438 H bersama keluarga dan masyarakat, saling berjabat tangan dan bersilaturahmi untuk saling memaafkan diantara sesama. Hal itu merupakan kesempatan yang berbahagia dan terindah dalam kehidupan berbangsa serta bernegara di Indonesia karena setiap orang saling memaafkan segala kesalahan sehingga menjadi pribadi yang fitri.



Wakil Ketua DPR Bidang Korekku Taufik Kurniawan

“Saya mengucapkan selamat idul fitri 1438 H, semoga kita menjadi pribadi yang fitri dan lebih baik dalam konteks Habluminallah dan Habluminannas,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dalam rilisnya, Minggu (25/06/2017) lalu.

Dalam konteks Habluminallah, tiap muslim ditempa imannya selama sebulan penuh, sehingga diharapkan menjadi pribadi yang suci dan merayakan hari kemenangan dengan penuh rasa syukur.

Ia mengharapkan, penempatan diri sebulan penuh itu bisa meningkatkan kualitas ibadah dan menjadi makhluk tuhan yang selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah SWT.

Menurutnya, perayaan Idul Fitri tahun ini sangat berkesan karena dirayakan ditengah hiruk pikuk dunia politik dan berbagai tantangan di segala aspek kehidupan masyarakat.

Kondisi kebangsaan saat ini, lanjutnya, banyak dikatakan beberapa pihak berada dititik yang mengkhawatirkan, berbagai serangan komentar antar anak bangsa terjadi dalam dunia maya maupun dunia nyata sehingga tidak jarang terjadi gesekan namun alhamdulillah tidak meluas.

Ia menegaskan, perayaan Idul Fitri tahun ini menjadi momentum untuk seluruh anak bangsa untuk melakukan introspeksi

kebangsaan dan pribadi, apa yang sudah dilakukan masing-masing untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Seluruh anak bangsa, ujar politisi PAN itu, tanpa mengenal suku, agama, ras, dan antar-golongan harus bisa bergandengan tangan, bahu membahu membangun semangat persatuan dalam bingkai kebhinekaan serta jadikan momentum Idul Fitri sebagai titik tolak mencapai tujuan tersebut.

“Masyarakat harus ingat bahwa bangsa Indonesia menjadi besar bukan atas jasa segelintir golongan namun seluruh anak bangsa sehingga semangat kebangsaan harus terus kita gelorakan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, ia mengharapkan dalam perayaan Idul Fitri, keiklasan tiap anak bangsa dibutuhkan sehingga antar sesama bisa saling memaafkan segala kesalahan yang pernah dibuat untuk kemudian menjadi pribadi yang unggul.

Taufik menilai bangsa Indonesia kedepan bukan hanya membutuhkan pribadi yang unggul dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) namun juga unggul dalam keimanan dan ketakwaan (Imtaq).

“Ilmu agama dan ilmu pengetahuan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga dua hal itu yang harus ada dalam diri masyarakat Indonesia sehingga menjadi pribadi yang unggul,” mantapnya.

Taufik juga mengingatkan bahwa tradisi silaturahmi dalam perayaan Idul Fitri menjadi salah satu tiang ukhuwah kebangsaan karena di dalamnya terdapat dialog yang harmonis di antara sesama dengan latar belakang kebhinekaan yang beragam. ■

(sc). foto : andri/hr

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER
Rizka Arinindy, Supardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO
Bagus Mudjiharjanto

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom

DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Mujiono

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita,
Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN



Halal Bihalal, Momen Tingkatkan Keharmonisan Pimpinan dan Karyawan DPR



Suasana halal bihalal Idul Fitri 1438 H Pimpinan DPR dengan karyawan Setjen dan BKD DPR di Gedung Nusantara IV, Senayan

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, halal bihalal merupakan momen yang tepat untuk meningkatkan keharmonisan dan kedekatan antara Pimpinan DPR dengan karyawan. Maka dari itu, kedisiplinan karyawan dalam menghadiri setiap acara perlu ditingkatkan.

“Karyawan di DPR ada 1320 tapi kenapa dalam acara ini yang hadir kurang dari 20 persen. Saya harap tingkat kedisiplinan karyawan dapat ditingkatkan,” kata Setya Novanto saat memberi sambutan pada acara halal bihalal menyambut Idul Fitri 1348 H di Gedung Nusantara IV, DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (06/07).

Sebab, lanjut Setnov beberapa kali kita (pimpinan DPR) mengundang karyawan dalam acara namun tingkat kehadirannya tidak banyak. Padahal melalui pertemuan seperti ini kita dapat mempererat tali silaturahmi, meningkatkan keharmonisan, kedekatan serta menghilangkan kesenjangan.

“Saya harap Pak Sekjen dan para Kepala Biro dapat meningkatkan kedisiplinan para karyawan. Karena kedisiplinan merupakan salah satu persyaratan untuk jenjang karir ke depan dan merupakan tolak ukur,” jelas Setnov.

Dalam kesempatan itu, Setya Novanto yang didampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, Fadli Zon, Serta Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso dan beberapa anggota DPR mengucapkan minal aidzin walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin.

“Walaupun dalam kondisi tidak sehat, saya tetap hadir, ini menunjukkan bahwa kedisiplinan pimpinan dimulai dari sini. Atas nama pimpinan saya meminta maaf lahir maupun batin kepada bapak dan ibu, semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memasukkan kita dalam golongan hambanya yang bertakwa. Terimakasih kepada pegawai DPR yang dengan keikhlasan telah meluangkan waktu untuk hadir,” imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Setnov berpesan kepada karyawan untuk mengisi hari setelah ramadhan dengan melanjutkan ibadah dan kesolehan. “Tidak ada istilah libur dari amal soleh, tidak ada istilah pensiun dari ibadah, dan tidak ada istilah cuti dari kebaikan. Semua itu harus terus mewarnai aktivitas kita dalam melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara kita tercinta,” ungkapnya.

Acara diakhiri dengan bersalaman antar karyawan dengan Pimpinan serta anggota DPR yang hadir. Mengutip sabda Rosullullah SAW, Novanto mengatakan, berjabat tanganlah kamu sekalian sesungguhnya jabat tangan ini dapat menghilangkan dendam dalam hati. Selain itu Nabi Muhammad juga bersabda tidak ada dua orang muslim yang berjabat tangan melainkan pasti diampuni untuk keduanya sebelum mereka berpisah. ■

(rnm,mp), Foto Jayadi/hr

Ketua DPR Apresiasi Kemajuan Sektor Pangan dan Tani



Ketua DPR Setya Novanto bersama Gubernur Sulsel saat panen raya di Maros Sulawesi Selatan

Beberapa waktu lalu, The Economist Intelligence Unit (EIU) dan Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN) Foundation merilis laporan Indeks Keberlanjutan Pangan (Food Sustainability Index/FSI) dari berbagai negara. Lembaga kajian dan analisis yang berpusat di Inggris ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-21 dengan skor 50,77, berada di atas Uni Emirat Arab, Mesir, Arab Saudi, dan India.

Menanggapi hasil kajian tersebut, Ketua DPR RI Setya Novanto menyambut baik dan memberikan apresiasi pada kinerja pemerintah dalam sektor pangan. “Saya sangat gembira, karena Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk ke-25 besar,” ujar Novanto

dalam pernyataan persnya kepada Parlemen, Rabu (5/7/2017).

Menurutnya, hasil ini sekaligus wujud nyata Nawacita Presiden Joko Widodo, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, khususnya di sektor pertanian. “Data yang saya dapatkan dari Badan Pusat

“Data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik menunjukkan pada Survei Pertumbuhan Ekonomi I 2017, sektor pertanian tumbuh pesat 15,59 persen, PDB sektor pertanian naik 7,12 persen, dan memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 13,59 persen,”



Statistik menunjukkan pada Survei Pertumbuhan Ekonomi I 2017, sektor pertanian tumbuh pesat 15,59 persen, PDB sektor pertanian naik 7,12 persen, dan memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 13,59 persen,” jelas Novanto.

Ini artinya kemajuan di atas merupakan peringkat terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan 20,48 persen. Keberhasilan lain yang perlu diapresiasi bisa dilihat mulai tahun 2016 sampai dengan saat ini Indonesia tidak impor beras medium. Sementara impor jagung turun hingga 67 persen. Novanto bersyukur, memasuki pertengahan 2017 ini belum ada impor jagung.

“Selain berbagai laporan tersebut, secara kasat mata kita bisa lihat pada Ramadhan dan Idul Fitri kemarin. Saya mengapresiasi Presiden Jokowi yang berhasil meningkatkan kinerja berbagai kementerian sehingga bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok dan tidak terjadi lonjakan yang memberatkan masyarakat,” ungkap Novanto.

Sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional karena menyerap tenaga kerja terbesar, sekitar 35 persen. Jika dilihat secara menyeluruh, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional mampu mencapai 55 persen. “Karena itu, saya meyakini memajukan Indonesia dimulai dengan memajukan sektor pertanian,” ujar Novanto.

Dia mengatakan, sebagai mitra kerja, DPR RI akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah dalam memajukan sektor pertanian. Terlebih Presiden Jokowi telah menginstruksikan seluruh jajaran kementerian untuk refocusing anggaran dengan mengurangi belanja operasional yang meliputi perjalanan dinas, rapat, dan rehabilitasi gedung.

“Saya mendorong anggaran Kementerian Pertanian pada 2018 yang akan mencapai Rp 22,65 triliun bisa digunakan sebaik mungkin, difokuskan pada pembangunan infrastruktur pertanian dan pemberian bantuan kepada petani, berupa alat dan mesin pertanian, benih, pupuk, serta asuransi pertanian,” imbuhnya. ■

(eko), Foto: Dok. Pribadi/Inf

Pansus Pemilu Diminta Segera Tuntaskan 5 Isu Krusial

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon mengatakan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Pemilu segera tuntaskan lima isu krusial dalam pembahasan RUU Pemilu yang belum menemukan kesepakatan, paling lambat tanggal 20 Juli 2017.

“Pansus harus menemukan kesepakatan lima isu itu, kalau tidak bisa dengan mufakat ya voting, paling lambat tanggal 20 Juli, tidak boleh lebih,” tegas Fadli di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (03/7/2017).

Salah satu isu krusial yang belum menemukan kesepakatan, lanjut Fadli yaitu mengenai syarat ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold). Terkait permasalahan itu, ia mengusulkan Presidential Threshold (PT) harus 0% atau dihapus. Sebab, ini merupakan konsekuensi dari pemilihan umum Presiden (Pilpres) dan pemilu Legislatif (Pileg) yang akan digelar serentak mulai tahun 2019 mendatang.

“Yang paling ngotot masalah presidential threshold kan pemerintah. Sudah jelas-jelas serentak masih memaksakan presidential threshold. Ini tidak masuk akal, tidak nalar,” kritisi Fadli.

Lebih lanjut Fadli menjelaskan, logikanya, jika pelaksanaan Pilpres dan Pileg berlangsung serentak, maka tidak ada lagi ambang batas presiden. Zero bahkan harus dihapuskan. Sebaliknya, menurut Fadli, harus ada peningkatan untuk ambang

“Kita dalam konstitusi boleh atau berhak untuk memilih dan dipilih, jadi setiap WNI tidak boleh di persulit untuk dipilih, Jangan dibikin seolah-olah calon tunggal,”



Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon

batas parlemen (Parliamentary Threshold).

“Ini termasuk yang paling diperdebatkan dan kelihatannya pemerintah memaksakan ambang batas presiden 20 persen,” ungkap politisi dari F-Gerindra ini seraya menegaskan tarik-menarik antara DPR dan pemerintah dalam membahas RUU pemilu dinilai karena ada kecenderungan pemerintah yang menginginkan munculnya capres-cawapres tunggal.

“Kita dalam konstitusi boleh atau berhak untuk memilih dan dipilih, jadi setiap WNI tidak boleh di persulit untuk dipilih, Jangan dibikin seolah-olah calon tunggal,” pungkasnya.

Selain masalah presidential threshold, empat masalah lainnya antara lain ambang batas parlemen, sistem pemilu, besaran daerah pemilihan, dan metode konversi suara ke kursi di DPR. ■

(mm/sc), foto : nunifhr



Pimpinan DPR bersama 7 anggota DK OJK terpilih

Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota DK OJK

Rapat Paripurna DPR akhirnya menyetujui tujuh orang Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2017-2022 pada Kamis, (06/07/2017). Dengan persetujuan dari DPR ini, ketujuh pimpinan OJK akan dilantik Mahkamah Agung (MA) pada 20 Juli mendatang.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno membacakan seluruh rangkaian proses yang telah ditempuh dalam uji kelayakan dan kepatutan.

Dalam laporannya Soepriyatno menyebutkan, pihaknya telah memilih satu ketua dan 6 calon anggota DK OJK. Hal tersebut, lanjut dia, berdasarkan hasil penghitungan suara terhadap 13 orang calon OJK yang diajukan

pemerintah.

“Berdasarkan hasil pemilihan, Komisi XI memutuskan 7 orang anggota DK OJK periode 2017-2022,” ujar Soepriyatno. Adapun ketujuh Anggota DK OJK periode 2017-2022 itu, antara lain: Wimboh Santoso, Nurhaida, Tirta Segara, Riswinandi, Heru Kristiyana, Hoesen dan Ahmad Hidayat.

“Apakah laporan Komisi XI tentang hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dapat disetujui?” tanya Taufik

Kurniawan. “Setuju” jawab seluruh hadirin sidang paripurna.

Sesuai ketentuan pasal 12 UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK, proses pengambilan keputusan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama memilih satu orang Ketua Dewan Komisiner OJK. Pemilihan dilakukan terhadap dua orang Calon Ketua OJK, yaitu Wimboh Santoso dan Sigit Pramono.

Berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan secara tertutup (voting) dan dilanjutkan dengan penghitungan suara, terpilih Ketua DK OJK Periode 2017-2022 yang memperoleh suara terbanyak, yaitu Wimboh Santoso.

Tahap kedua untuk memilih enam calon Anggota DK OJK dengan mengikutsertakan Calon Ketua OJK yang tidak terpilih pada tahap pertama. Berdasarkan hasil penghitungan suara terhadap 13 orang Calon Anggota Ketua DK OJK, diperoleh hasil enam calon anggota DK OJK yang memperoleh suara terbanyak. ■

(ns,mp), Foto Andrih



Keterlibatan DPR RI Dalam Forum Internasional Harus Ditanggapi Positif Oleh Pemerintah

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam forum *speaker* negara-negara Euro Asia, harus ditanggapi secara positif oleh Pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti pertemuan di kawasan tersebut. Apalagi, keterlibatan Indonesia di forum ini lebih luas, karena bisa melibatkan diri dalam banyak sekali tema perdebatan mulai dari tema ekonomi dan perdamaian juga isu-isu terkini terkait dengan terorisme keamanan dunia dan sebagainya.

“ Saya kira itu yang pertama ya. Nah, adapun secara spesifik terhadap Korea, ya tentu ada banyak yang menarik di Korea itu terutama partisipasi publik nya di dalam isu korupsi. Dan yang menarik juga adalah partisipasi publik itu membuat DPR Korea-nya itu sangat dinamis dalam melakukan legislasi aturan tentang anti korupsi,” kata Fahri kepada Parlemenaria, Selasa (27/6/2017) saat menjelaskan agenda Meeting of Speakers of Eurasian Countries Parliaments (MSEAP) yang ke-2 di Seoul, Korea Selatan.

Dalam kesempatan itu, Fahri Hamzah didampingi Nurhayati (F-PPP) dan Sartono Hutomo (F-PD). Ia dan rombongan menghadiri acara Meeting of speakers of Euro Asian Countries Parliament. Acara tersebut bertajuk Promoting or interparliamentary Cooperation for Common Prosperity the Euro Asian Region yang digelar pada 26-28 Juni 2017.

Pimpinan DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu menjelaskan bahwa salah satu yang menarik kalau Euroasia itu mayoritas tanah, sementara Indonesia mayoritas laut. Mungkin kalau boleh dibilang, 70 persen dari kawasan Euroasia ini didominasi oleh daratan Cina. Negara-negara di Asia Tengah itu, menurut Fahri adalah *Land lock* karena semua rata-rata tidak punya laut.

“Nah, sementara Indonesia kan 70 persen laut. Jadi ini jelas secara kasat mata kalau kita bicara *comparative advantage*, maka letak geografis

Indonesia itu, banyak yang bisa dipertukarkan. Kalau Presiden Jokowi bicara soal tol laut, kita bicara tentang maritim, orang-orang sini nggak ngerti maritim banyak yang *land lock* nggak punya laut Nah kita bicara maritim, sehingga potensi kelautan kita bisa kita pertukarkan dengan mereka, dan banyak lagi aspek-aspek lain bisa kita perdalam,” katanya.

Selain negara dengan 70 persen laut, tambah politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Indonesia ini negara muslim dan dalam forum memang ada juga Afghanistan, Iran dan negara-negara muslim di Asia Tenggara, tetapi negara muslim yang demokrasi mungkin

hanya Indonesia.

“Karenanya itu, menjadi suatu poin penting lagi. Jadi, keterlibatan Indonesia ini lebih luas, dan bisa melibatkan diri dalam banyak sekali tema perdebatan, mulai dari tema ekonomi dan perdamaian juga isu-isu terkini terkait dengan terorisme keamanan dunia dan sebagainya,” ujarnya.

Fahri juga mengatakan bahwa dalam forum, dirinya bertemu dengan ACRC (anti corruption and civil right commisions), yaitu satu lembaga yang menggabungkan ada banyak lembaga lainnya termasuk Ombudsman didalamnya yang Indonesia ikut bergabung.

“Saya kira ini adalah capaian yang perlu dicontoh oleh Indonesia, karena Korea Selatan ini adalah negara yang *alert* perang dengan Korea Utara, tetapi pertumbuhan ekonomi dan *income* per kapitanya jauh di atas kita. Mereka sekarang *income* per kapitanya itu 28000 US Dollar per kapita, itu tiga kali kita atau bahkan lebih, nah itu yang harus kita contoh secara baik dari negara ini,” pungkasnya. ■

(nt), foto: nita juwita/hr



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah didampingi anggota BKSAP Nurhayati (F-PPP) dan Sartono Hutomo (F-PD) bertemu dengan anggota parlemen Korea Selatan disela-sela Sidang MSEAP Ke-2 di Seoul

KBRI Kairo Diharapkan Lindungi Empat Mahasiswa Indonesia yang Ditangkap

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berharap, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo, Mesir, dapat bersungguh-sungguh melindungi dan memperjuangkan empat mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap oleh otoritas keamanan Mesir.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon menerima mahasiswa Al-Azhar University Kairo di ruang kerjanya

Kempat mahasiswa Al Azhar University itu ditangkap karena berada di wilayah terlarang yaitu Samanud. Mahasiswa tingkat sarjana dan pasca sarjana itu berasal dari Bandung, Lampung, Bontang dan Surabaya, bernama Adi Kurniawan, Achmad Afandi Abdul Muis, Rifai Mujahidin Al Haq dan Mufqi Al Banna.

“Kita berharap kepada KBRI supaya mahasiswa mendapat perlindungan hukum, dan beraktivitas kembali. Karena tidak ada hal-hal yang menyalahi aturan atau pelanggaran yang dilakukan oleh empat mahasiswa itu,” kata Fadli, usai menerima keluarga empat mahasiswa itu

beserta tim advokasi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Politisi F-Gerindra itu menyayangkan, semenjak empat mahasiswa itu ditahan pada 3 Juni lalu, tak ada kejelasan proses hukum. Seharusnya, menurut Fadli, KBRI bertugas melindungi dan melayani kepentingan WNI yang ada di luar negeri.

“Harus ada upaya konkrit untuk melindungi WNI, akan kita tanyakan kepada Kementerian Luar Negeri,” tegas Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan DPR RI itu.

Berdasarkan aspirasi yang diterimanya, politisi asal dapil Jawa Barat itu akan segera menyurati Kementerian

Luar Negeri, dan berkomunikasi dengan KBRI di Mesir, termasuk menyampaikan permasalahan ini kepada Duta Besar Mesir di Indonesia.

Sebelumnya, Tim Pengacara dari keempat mahasiswa itu, Heru Susetyo mengatakan, semenjak ditahan pada 3 Juni lalu, tak ada kejelasan hukum. Bahkan, KBRI di Kairo pun dinilai menemui jalan buntu.

“Tak ada kejelasan. Belakangan informasinya malah simpang siur. Keluarga juga tidak bisa komunikasi dengan mahasiswa. Jangan sampai mereka di deportasi, karena nanti tidak bisa melanjutkan pendidikannya,” kata Heru yang diamini keluarga empat mahasiswa.

Sebagaimana diketahui, empat orang mahasiswa asal Indonesia ditahan oleh otoritas keamanan Mesir sejak 3 Juni lalu. Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Mesir, Ahmad Baihaqi mengatakan keempat mahasiswa tersebut memasuki wilayah terlarang, Samanud.

Baihaqi menuturkan pemerintah Mesir telah menetapkan wilayah Samanud dalam kategori zona merah karena wilayah tersebut dianggap sebagai markas teroris. Di Samanud juga terdapat seorang syekh yang dianggap selalu berseberangan dengan pemerintah Mesir.

“KBRI sudah banyak memberikan upaya seperti memberikan identitas empat mahasiswa tersebut ke kepolisian, namun mereka tidak percaya karena ini markas teroris. Kasusnya tidak bisa dimanfaatkan pemerintah Mesir. Kalau sudah tertangkap maka susah untuk keluar maka harus dideportasi,” jelas Baihaqi. ■

(sif/sc), foto : arief/hr

Aksi Teror tak Perlu Dikaitkan dengan Revisi UU Antiterorisme

Maraknya aksi teror belakangan ini tak perlu dikaitkan langsung dengan agenda revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme). Pansus DPR yang bertugas membahas RUU usulan pemerintah ini diharapkan bersikap hati-hati.

Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon menyerukan hal tersebut dalam rilisnya yang diterima Parlemen, Rabu (5/7/2017). Pernyataan Fadli itu menanggapi desakan banyak pihak agar DPR dan pemerintah segera merevisi UU Antiterorisme. Banyak persoalan dalam draf revisi yang harus disikapi hati-hati oleh DPR. Misalnya, sebut Fadli, usulan masa penahanan dari enam bulan menjadi 510 hari.

“Ini tak bisa diloloskan begitu saja, sebab

proses penegakkan hukum atas tindak terorisme juga tak boleh mengabaikan hukum lainnya yang masih berlaku. Jangan sampai penegakkan hukum dilakukan dengan cara melanggar hukum, itu prinsip yang ingin kita jaga. Kita tak berharap tindakan hukum sejenis Petrus di masa lalu kini bisa terulang kembali dalam bentuk lain,” tanggang Fadli.

Ditegaskan politisi Partai Gerindra tersebut, filosofi penanganan tindak terorisme juga tak boleh berangkat dari prinsip pemberantasan teroris itu sendiri. Itulah yang selama ini menonjol. Penanganan terorisme justru harus memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif. Saat ini, ungkapnya, pembahasan RUU Antiterorisme sudah cukup maju. 60% dari total 112 DIM sudah dibahas Pansus.

Fadli berharap, aksi terorisme sebagai *extraordinary crime* tidak memberikan cek kosong bagi penegak hukum. “Kita harus belajar dari kesalahan dalam menangani *extraordinary crime* lainnya, seperti tindak pidana korupsi, misalnya. Lembaga atau aparat

yang menangani *extraordinary crime* harus tetap bisa dikontrol dan diawasi.” paparnya.

Penanganan tindak terorisme, sambung Fadli lagi, harus tetap berada dalam koridor hukum dan tak boleh terus-menerus menggunakan diskresi. *Due process of law* harus dijaga. “Itu sebabnya, meski ada desakan dari sejumlah pihak agar revisi UU Antiterorisme segera disahkan, DPR tak bisa begitu saja mengikuti desakan tersebut. Kalau pembahasannya tergesa-gesa, risikonya bisa banyak sekali nantinya,” imbuh Fadli.

Secara teknis dalam revisi UU Antiterorisme banyak pihak yang harus disinergikan, mulai dari Polri, BNPT, BIN, TNI, dan masyarakat sipil. Bentuk sinerginya pun sedang diatur. Dengan sinergi ini diharapkan tak ada penyalahgunaan wewenang oleh negara atau aparat dengan dalih menanggulangi terorisme.

Fadli menjelaskan, DPR banyak menerima masukan menyangkut revisi UU ini. Misalnya, definisi terorisme saja, ada 172 rancangan yang masuk usulan pembahasan. Untuk memformulasikannya, tentu membutuhkan perumusan yang



Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon

matang. Ini butuh waktu dan kecermatan.

“Jadi, tak ada kaitan belum selesainya pembahasan revisi UU Antiterorisme dengan aksi teror yang marak belakangan ini. Pembahasan yang sedang berlangsung di parlemen saat ini konteksnya hanya merevisi saja, sehingga bukan merupakan faktor penghambat bagi aparat penegak hukum dalam menangani aksi teror,” tutup Fadli. ■

(mb/sc) Foto : Anief/hr

Pemindahan Ibukota Terkesan Gegabah

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai wacana pemindahan ibukota tahun 2018 terkesan gegabah dan terburu-buru, di tengah persoalan pemerintah yang banyak dan utang luar negeri yang menumpuk. Pemindahan Ibukota semestinya dikaji secara mendalam dan komprehensif.

Fadli menegaskan pemindahan ibukota saat ini belum tepat. Sebab, negara belum memiliki anggaran yang memadai untuk pemindahan. Pemindahan ibukota memerlukan anggaran besar, sementara banyak proyek infrastruktur terancam mangkrak karena kesulitan dana.

“Pemerintah konsentrasi saja dulu ke pekerjaan kecil, jangan memikirkan pindah ibukota. Itu pekerjaan besar. Pekerjaan kecil



Wakil ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon

sekarang bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan ke masyarakat. Bagaimana menyejahterakan masyarakat yang makin sulit, fokus ke itu saja dulu,” tegas politisi dari F-Gerindra ini dalam keterangan persnya, Kamis (6/7/2017).

Lebih lanjut, menurut Fadli, dirinya akan mengecek aturan pemindahan ibukota, karena preseden pemindahan ibukota belum ada. Belum lagi, keputusan pemindahan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga, setidaknya memerlukan persetujuan DPR.

“Pemindahan ibukota memerlukan perencanaan yang matang serta pelaksanaan jangka panjang. Contohnya, Malaysia yang membuat Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan, sedangkan Kuala Lumpur menjadi pusat bisnis,” imbuhnya.

Secara terpisah Ketua Komisi V Fary Djemy Francis mempertanyakan keseriusan pemerintah mengenai hal tersebut. Sebab, sejauh ini pemerintah belum pernah membahasnya dengan DPR, khususnya Komisi V yang membidangi perhubungan dan infrastruktur.

“Selama saya memimpin Komisi V, tidak pernah ada pembicaraan dari Kementerian PUPR bahwa tahun 2018 pindah ibukota. Bahkan, dalam pembahasan anggaran Kementerian tahun 2018, Kementerian sudah mempresentasikan program kerja mereka, tapi tidak ada yang mengatakan dibutuhkan anggaran untuk pemindahan ibukota,” jelas Fary.

Menurut Fary, wacana pemindahan ibukota bukanlah sesuatu yang baru. Sebelumnya pun, Komisi V mendukung penuh wacana tersebut. Hanya saja, dirinya mempertanyakan mengapa pemindahan ibukota tidak ada dalam program kerja jangka panjang pemerintah.

“Negara ini jangan diatur berdasarkan pemimpin semalam. Persoalannya bukan memungkinkan atau tidak, tetapi ada di dalam program kerja *enggak*. Jangan *ujug-ujug* ada di kepala, kajian, besok langsung dilakukan. Sama seperti kereta api cepat Jakarta-Surabaya, tiba-tiba yang didorong Jakarta-Bandung, sampai sekarang ngga jalan,” tandas politisi dari dapil NTT II ini. ■

(ann/mp) Foto : Runit/hr



Ketua DPR RI Setya Novanto hadir Kongres Diaspora Indonesia ke-4

Ketua DPR Apresiasi Kongres Diaspora Indonesia ke-4

Ketua DPR RI Setya Novanto mengapresiasi Kongres Diaspora Indonesia ke-4. Kongres yang digelar hari Sabtu lalu, (1/7/2017) di Jakarta cukup menyita perhatian. Bukan hanya lantaran mereka yang hadir adalah ribuan warga negara Indonesia yang berkiprah di luar dan di dalam negeri, namun juga momentum kongres ini menghadirkan Mantan Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Obama.

“Saya sangat mengapresiasi perhelatan Kongres ini. Dalam suasana Idul Fitri 1438 H serta dalam suasana masyarakat muslim yang baru saja menunaikan ibadah Puasa, bangsa Indonesia disuguhkan pandangan dan pemikiran Obama yang juga pernah bermukim di Indonesia semasa kecil, tentang globalisasi, menghargai perbedaan pendapat, dan bagaimana menumbuhkembangkan peran kaum muda dalam membangun bangsa dan negara di masa yang akan datang,” paparnya dalam rilis kepada Parleментарia.

Sebagaimana diketahui, di sela-sela liburannya di Indonesia, Obama menyempatkan diri menyampaikan Pidato di hadapan ribuan masyarakat yang tergabung dalam Jaringan

Diaspora Indonesia di 55 negara di seluruh dunia.

“Sungguh sebuah pemandangan yang meriah, mengingat pidato Obama merupakan pidato pertama di Asia setelah ia menyelesaikan jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat selama 2 Periode,” kata Ketua Umum Partai Golkar ini.

Menurutnya, berbagai pandangan dalam pidatonya sangatlah berharga. Obama adalah mantan pemimpin negara besar di dunia. Dengan pikiran dan pandangan yang terbuka, beliau memberi dukungan sekaligus pujian terhadap Indonesia dalam mengelola kehidupan sosial yang dilatarbelakangi aneka ragam perbedaan. Obama kagum dengan bhinneka tunggal ika sebagai nilai yang hingga saat ini menjadi kekuatan dalam menopang keutuhan bangsa.

“Saya mendukung niat baik Obama untuk terus membangun komunikasi



Lembaga Keuangan Fiktif jadi Tantangan OJK

Tujuh Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2017-2022 telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017). Lembaga keuangan fiktif menjadi salah satu tantangan DK OJK dalam menjalankan kinerjanya.



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku
Taufik Kurniawan

“Jangan sampai ada penipuan oleh lembaga keuangan, baik penipuan investasi bodong, hingga penggandaan uang. OJK harus memastikan tak ada penyimpangan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, lembaga pembiayaan, koperasi, atau non lembaga perbankan mikro lainnya,” kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, usai memimpin Rapat Paripurna.

Politisi F-PAN itu menambahkan, OJK juga harus melaksanakan fungsi pendidikan keuangan untuk masyarakat, agar tidak mudah tergiur dengan keuntungan lembaga keuangan atau investasi yang dirasa tak masuk akal, termasuk lembaga keuangan yang ilegal.

“Artinya pemahaman pendidikan terkait fungsi lembaga keuangan harus dijadikan salah satu poin untuk menyadarkan masyarakat bahwa investasi yang dilakukan masyarakat dilindungi oleh adanya OJK. Masyarakat harus mendapat perlindungan,” harap Taufik.

Dengan berbagai sosialisasi terkait profil lembaga keuangan maupun kewajiban lembaga itu kepada nasabahnya, diharapkan dapat meminimalisir penipuan yang menimpa masyarakat. Masyarakat jangan sampai tertipu oleh lembaga keuangan ilegal, bahkan mengalami kerugian yang cukup besar.

Taufik juga mendorong, OJK mampu memberikan sanksi yang tegas kepada lembaga keuangan yang tidak memenuhi unsur peraturan perundang-undangan, bahkan yang dapat merugikan masyarakat. OJK harus mampu melihat berbagai kasus penipuan lembaga keuangan yang menimpa masyarakat, beberapa tahun terakhir.

“Sebagian besar DK OJK terpilih ini merupakan praktisi, kita harapkan fungsi dan peran profesionalisme mereka bisa membantu untuk mengurangi dan meminimalisir adanya praktek-praktek ilegal dan tidak prudent terhadap fungsi dari lembaga keuangan mikro, maupun lembaga pembiayaan yang ada di masyarakat, yang memerlukan pengawasan dari pemerintah,” jelas Taufik.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu pun berharap, OJK bersinergi dengan lembaga terkait, seperti Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan institusi lainnya, sehingga fungsi kontrolnya menjadi maksimal. DK OJK terpilih pun diharapkan bekerja secara profesional dalam memberikan warna baru dalam mengantisipasi ekonomi global yang masih sangat dinamis.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno melaporkan, pihaknya telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022. Uji kepada 14 calon dilakukan pada awal Juni lalu.

Setelah melakukan serangkaian uji, dan pengambilan keputusan, serta mendapatkan masukan, saran dan pendapat dari pihak terkait, Komisi XI DPR menetapkan 7 anggota terpilih.

Soepriyatno menjelaskan, Wimboh Santoso terpilih menjadi Ketua DK OJK, mengguguli calon lainnya, Sigit Pramono. Sementara untuk 6 Anggota DK OJK, terpilih Nurhaida, Tirta Segara, Riswinandi, Heru Kristiyana, Hoesen dan Ahmad Hidayat. ■

dengan Indonesia dalam rangka menghadapi kehidupan global. Tentu saja, dukungan tersebut sangat memberi kesan dan kekuatan moril bagi kita. Obama telah menunjukkan bahwa di mana pun ia berada, setinggi apapun jabatan yang dia pernah raih, tidak pernah mengubah prinsip dan nilai yang ia anut,” terangnya.

Ke depan, lanjut politisi dari dapil Nusa Tenggara Timur ini, kita perlu dukungan banyak pihak untuk membangun bangsa dan negara. Dukungan yang dapat membuat kita tetap menatap masa depan yang lebih baik. Dukungan yang membuat kita tetap tegak berdiri di atas potensi yang kita miliki.

“Kita bisa menjadi contoh bagi dunia. Kita bisa mewariskan tentang bagaimana mengelola perbedaan menjadi kekuatan, mengelola keanekaragaman menjadi satu kesatuan,” tegasnya mengakhiri. ■

(sc), foto : jaksa/hr

(sf/mp) foto: Arief/hr

Kenaikan Bantuan Dana Bisa Tingkatkan Kualitas Parpol

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai kenaikan dana bantuan partai politik yang mencapai 10 kali lipat bisa menjadi peluang untuk partai politik meningkatkan kualitasnya serta dapat memuluskan pembahasan RUU Pemilu di DPR. Demikian disampaikan Agus Hermanto kepada Media, Selasa (04/07/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Memang ini merupakan bagian dari komitmen pembicaraan dari Undang-Undang Pemilu. Sehingga kalau ini direalisasi, ini merupakan hal yang menuju pembicaraan UU Pemilu lebih mulus. Karena memang kita rasakan kalau dana parpol dinaikkan ini bisa menjadi lebih baik,” ujar Agus.

Agus mengatakan jika dana bantuan dari pemerintah naik, maka parpol akan lebih leluasa untuk meningkatkan kemampuan dan elektabilitasnya. “Parpol juga menjadi concern dalam pengembangannya,” imbuh Politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, KPK telah mengingatkan

agar pengelolaannya harus transparan jika rencana peningkatan bantuan dana partai politik akan terealisasi. Agus pun sepakat dengan hal tersebut.

“Betul seperti itu sehingga memang penggunaan dana parpol itu sampai saat ini yang melalui kas, harus dikenakan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ada. Sehingga apabila ini dinaikkan konsentrasi parpol bisa lebih ditingkatkan,” jelas Agus.

“Kepada penggunaan anggaran harus sesuai dengan tata aturan undang-undang yang ada. Sehingga anggaran yang menggunakan APBN atau negara harus dipertanggungjawabkan dan sesuai aturan



Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang Agus Hermanto

yang ada,” sambung Agus.

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah merencanakan menaikkan dana parpol 10 kali lipat dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1000 persuara. Kemendagri sedang merancang revisi PP No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. ■

(ns/sc), foto : Ojje/hr.

Kirim Pasukan TNI untuk Bertempur di Filipina Tak Diatur dalam UU

Presiden Filipina Rodrigo Duterte membuka peluang bagi Indonesia untuk terlibat operasi militer dalam menggempur ISIS di Marawi, Filipina Selatan. Namun pemerintah Indonesia diingatkan untuk tidak bersikap reaktif.

“Pengiriman pasukan TNI tidak diatur dalam peraturan dan Undang-Undang,” ingat Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin dalam rilis yang diterima Parleментарia, Senin (03/7/2017).

Politisi F-PDI Perjuangan itu menjelaskan, setidaknya ada tiga acuan peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan terkait hal ini. Pertama, jelas Hasanuddin, mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, disebutkan: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kemudian, lanjut Hasanuddin, masih dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 3 UUD

1945, dijelaskan bahwa TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

“Makna yang terkandung, yakni, TNI bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” imbuh Hasanuddin.

Kedua, Pasal 10 ayat 3 butir d dalam UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara memang menyebut bahwa TNI dapat ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

“Dalam penjelasannya, tugas TNI yang masuk dalam kategori operasi militer selain perang (OMSP) itu antara

lain berupa bantuan kemanusiaan (civil mision). OMSP juga dilakukan berdasarkan permintaan atau perundang-undangan,” tegas Hasanuddin.

Hasanuddin menambahkan, kalau pun mau disinggung pada penjelasan soal wewenang TNI terkait dengan operasi militer selain perang (OMSP) sebagaimana yang termaksud dalam butir b ayat 6 yang menyebut TNI memiliki tugas untuk melaksanakan menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, maka ada hal yang mesti diperhatikan.

“Salah satunya, pengiriman satgas TNI dalam operasi perdamaian dibawah bendera PBB, harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI, serta memperhatikan pertimbangan institusi lainnya yang terkait,” imbuhnya.

Ketiga, bila merujuk pada UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 bahwa tugas pokok



TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sehingga, jika mengacu pada tiga produk Undang-Undang di atas, maka sangat jelas bahwa pemerintah Indonesia tidak diperkenankan mengirim pasukan tempur. TNI hanya diizinkan melakukan penugasan dalam pasukan perdamaian di bawah bendera PBB.

“Walaupun Indonesia memang terikat dalam komunitas bangsa-bangsa ASEAN,

tetapi ASEAN juga bukan merupakan fakta pertahanan bersama. Jadi Indonesia juga tidak punya dasar hukum untuk mengirim pasukan TNI ke negara-negara ASEAN termasuk Filipina,” ujar Hasanuddin.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu menyarankan, bantuan Indonesia kepada Filipina dapat berupa bantuan logistik, pelatihan militer, alat kesehatan, atau data intelijen lainnya yang diperlukan a n g k a t a n

perang Filipina.

“Lagi pula, berdasarkan hukum Filipina, operasi militer yang melibatkan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari unsur parlemen mereka,” tutup Hasanuddin. ■



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin

(sfs/sc), foto : azka/hr.

Ketua Komisi IV Akan Tindak Lanjuti Penyebab Beberapa Kelompok Tani Tolak Asuransi Petani

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo akan segera menindaklanjuti informasi terkait adanya kelompok tani yang menolak masuk asuransi petani, akibat adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan asuransi tersebut.



Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo

“Terus terang, saya baru mendengar kabar adanya petani atau kelompok tani yang keberatan atau menolak program AUP ini. Harus saya jelaskan bahwa program asuransi petani itu pada awalnya dibentuk DPR RI bersama pemerintah dengan semangat untuk memberikan

perlindungan para petani dari peristiwa gagal panen yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti serangan hama atau wereng, kekeringan, banjir, dan berbagai bencana alam lainnya. Jika kemudian dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, tentu akan kami tanyakan kepada pemerintah (dalam hal ini Menteri Pertanian),” jelas Edhy kepada Parlemen di Jakarta, Rabu (5/7).

Belakangan muncul informasi dari media bahwa beberapa kelompok tani di sebuah daerah di Boyolali, Jawa Tengah menolak masuk dalam asuransi petani. Hal tersebut disebabkan sulitnya pengajuan klaim kepada asuransi ketika mereka mengalami gagal panen. Konon, asuransi mensyaratkan akan melakukan penggantian jika gagal panen petani minimal mencapai tujuh puluh lima persen.

“Saat membentuk asuransi tersebut bersama pemerintah, kami memang tidak sedetail itu ikut mengatur berbagai persyaratan di dalamnya. Namun yang kami ketahui, bahwa penggantian

tersebut sekitar Rp6 juta per hektarnya. Jika kemudian di lapangan ada aturan gagalnya harus minimal tujuh puluh lima persen, kami belum tahu. Yang pasti jika memang dalam aturannya ada kebijakan asuransi yang memberatkan petani, sesuai fungsi controlling yang ada pada DPR, tentu kami akan tindaklanjuti, bahkan akan kami tinjau ulang kebijakan tersebut,” tegas politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini.

Sebagaimana diketahui pada tahun 2016 lalu Kementerian Pertanian bersama dengan DPR membentuk Asuransi usaha tani padi (AUP). Besaran premi yang seyogyanya harus dibayarkan para petani adalah Rp180 ribu per hektar/musim tanam. Namun pemerintah memberikan subsidi bantuan premi sebesar 144 ribu per hektar/musim tanam. Maka petani hanya wajib membayar sebesar Rp36 ribu per hektar/musim tanam. Jika kemudian luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari satu hektar, maka besaran premi dan ganti rugi yang akan diterima oleh petani akan disesuaikan kemudian. Para petani akan mendapatkan pertanggung jawaban sebesar Rp6 juta per hektar/musim tanam. ■

(Ayu), Foto: Kresno/hr.

Jumlah Jamaah Haji Bertambah, Masalah Jangan Ikut Bertambah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid berharap penambahan jumlah jamaah haji tahun 2017 nanti tidak diikuti dengan penambahan masalah terkait penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah Indonesia.

“Jamaah haji tahun 2017 M/1438 H nanti berjumlah 221 ribu orang. Ada tambahan sebanyak 52 ribu orang dari jumlah jamaah tiga tahun sebelumnya. Memang Kementerian agama (Kemenag) sudah berpengalaman menangani jamaah dengan jumlah tersebut, sebelum ada pengurangan jumlah quota haji Indonesia,” papar Sodik dalam siaran persnya kepada media di Jakarta, Minggu (02/7/2017).

Akan tetapi, Sodik mengingatkan, karena sampai tahun 2016 (sebelum ada tambahan jamaah) masih ada beberapa masalah, maka Kemenag harus meningkatkan kinerja pengelolaan hajinya. “Sehingga bertambahnya jamaah tidak menambah masalah, bahkan misi peningkatan mutu pelayanan haji dapat terlaksana,” ujarnya.

Dijelaskan politisi dari Fraksi Partai Gerinda itu, persiapan manajemen haji telah diputuskan dalam pembahasan dan penetapan BPIH (biaya perjalanan ibadah haji) yang merupakan tahapan perencanaan (planning) pengelolaan haji. Tahapan perencanaan ini harus ditindak lanjuti dengan pengorganisasian (organizing) dan pelaksanaan (actuating) yang tepat dan pengawasan (controlling) yang ketat.

Dengan bertambahnya jamaah serta berdasarkan evaluasi tahun lalu, menurut Sodik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih sungguh-sungguh oleh Kemenag dalam penyelenggaraan haji tahun 2017 M/1438 H nanti.

Pertama adalah kesiapan jamaah. Sesempurna apapun fasilitas dan regulasi jika jamaah tidak disiapkan dengan baik, maka akan selalu menimbulkan masalah apalagi haji merupakan extraordinary event. Maka manasik pola baru yang materi, metode dan frekuensi sudah ditambah, harus dilaksanakan dengan lebih baik agar membentuk jamaah yang lebih siap.

Selain kesiapan Jamaah, juga perlu diperhatikan kesiapan petugas. Petugas kloter dan non kloter harus ditatar lebih baik

lagi sesuai perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam penetapan BPIH. Petugas yang prioritas adalah pemimpin langsung yakni ketua regu, ketua rombongan, petugas kesehatan, petugas perlindungan dan keamanan, pembimbing ibadah, petugas imigrasi, petugas fasum dan makanan.

Penanganan Visa, juga harus terus diperhatikan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Proses pendaftaran, pembuatan pasport harus lebih akurat dan cepat agar proses visa juga lebih cepat. Sebagaimana diketahui tahun lalu ada data jamaah yang beda nama dalam passport. Kasus yang menghebohkan tahun lalu adalah keterlambatan visa. Ia berharap hal seperti itu tidak terulang kembali.

Pengelompokan jamaah juga diperlukan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ia berharap agar jamaah suami istri, jamaah satu keluarga, jamaah satu KBIH, jamaah satu kota diupayakan untuk tidak terpisah. Mengingat tahun lalu banyak yang terpisah dan meresahkan.

Dilanjutkan Sodik, hal lain yang perlu mendapat perhatian khusus adalah terkait manajemen jadwal embarkasi dan keberangkatan. Rencanakan dan pastikan waktu di embarkasi dengan keberangkatan secara layak. Tahun lalu ada jamaah yang diembarkasi hanya 2-4 jam sehingga bagi jamaah lansia dan Jamaah Resti (resiko tinggi) cukup merepotkan.

Selain kelima hal tersebut, dipaparkannya, ada sepuluh hal lainnya yang turut menjadi perhatian Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Seperti manajemen jamaah resti dan lansia. Hal ini untuk memastikan tenaga pendamping serta penanganan tindakan darurat. Prioritas pemeriksaan imigrasi (keluar dan masuk arab Saudi) bagi jamaah lansia dan jamaah Resti. Kesiapan maktab sesuai dengan nomor dan jumlah jamaah. Penjelasan tentang berbagai fasilitas dan



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid

cara penggunaan fasilitas di pesawat, maktab, fasilitas bis, fasilitas elektrik dan lain-lain. Kasus kebakaran, kasus jamaah yang tidak bisa gunakan bis dan lain-lain karena kurang mantabnya penjelasan waktu manasik dan waktu di maktab bisa dihindari.

Keberadaan dan penandaan fasilitas Indonesia yang eksklusif mencolok, misalnya dengan bendera, ukuran dan warna yang mudah diidentifikasi jamaah. Jumlah posko dan militansi petugas perlindungan dan keamanan khususnya pencari jamaah hilang harus ditingkatkan, baik di Makah, Madinah terutama di Mina. Kualitas dan kuantitas fasilitas di ARMUNA terutama di Mina harus terus diperbaiki. Misalnya kualitas toilet dan kapasitas tenda agar jamaah tertampung dengan layak. Mengingat pernah ada kasus jamaah harus tidur miring karena tenda tidak cukup

Sosialisasi, edukasi dan persuasi regulasi hari tarwiyah dan waktu jumroh harus terus dijelaskan dengan baik. Koordinasi yang maksimum antar petugas Kemenag dengan KBIH, antar petugas kloter dan non kloter, antara petugas Indonesia dengan maktab, dan lain-lain. agar penyelenggaraan dan pelayanan jamaah haji maksimum.

Tim Pengawas haji yang maksimum, detail dan tegas untuk semua urusan terutama untuk pengawasan mitra kerja dari pihak arab sudi spt kualitas dan jumlah bis, kualitas dan jumlah fasilitas di maktab, kualitas dan jumlah catering, kualitas dan kapasitas tenda dan lain sebagainya.

“Dengan kelima belas item hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan pelayanannya tersebut sehingga tidak ada lagi kekhawatiran menurunnya pelayanana terkait penambahan jumlah jamaah haji pada tahun ini,” pungkasnya. ■

(ayu/sc), foto : Jaka/hr



Bangun Semangat Saling Menghargai Sesama Lembaga Negara

Pansus Hak Angket KPK DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna mengadakan rapat konsultasi dengan Pimpinan beserta jajaran di Institusi BPK Pusat.

Dalam Konferensi Persnya Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar mengatakan, tujuan kedatangan anggota Pansus tersebut adalah untuk membangun semangat komitmen saling menghargai dan saling menghormati diantara sesama lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional.

“Karena bagaimanapun bagi kami di DPR, BPK adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan pasal 23e UUD 1945 yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan pertanggung jawaban keuangan negara,” kata Agun di Gedung BPK RI, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Tugas dan Fungsi DPR sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah menjalankan fungsi pengawasan, lanjut Agun, salah satu diantaranya yakni pengawasan terhadap pelaksanaan APBN. Dimana proses penggunaan, pengelolaan, dan pertanggung jawabannya melalui proses yang disampaikan oleh audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan.

“Selain itu kami juga ingin membangun semangat saling menghargai dan saling menghormati antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Karena mengelola negara dalam sebuah negara demokrasi tidak mungkin hanya bisa dilaksanakan oleh satu lembaga negara, yakni ada DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY, BI dan sebagainya,” papar politisi Partai Golkar ini.

“Semua itu adalah lembaga-lembaga negara yang secara konstitusional berkewajiban menjalankan tugas negara untuk mencapai tujuan negara yaitu yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi



Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar saat kunjungan kerja ke Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

kami pada semangat itu, mendatangi BPK semata-mata ingin menjalin, membangun, dan memberikan contoh kepada seluruh lembaga-lembaga negara untuk menata kedepan yang lebih baik,” paparnya.

Sementara itu, terkait dengan keberadaan Pansus Angket itu sendiri, Agun menyatakan bahwa Hak Angket adalah tugas konstitusional yang dimiliki dewan sebagai fungsi pengawasan yang tertinggi dan dijamin oleh undang-undang.

“Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan inilah, tentunya juga kita tidak bisa lepas berkaitan dengan pengawasan terhadap apa yang terjadi, apa yang ada berkaitan dengan lembaga KPK. Untuk itu kedatangan kami ke BPK untuk meminta proses audit, proses pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban KPK sejak KPK berdiri,” paparnya.

Sampai sejauh mana bahkan kinerjanya seperti apa, tambah Agun. Bagaimana penanganan persoalan yang terkait dengan penggunaan keuangannya dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara pemeriksaan pengelolaan kewenangan negara, itu sampai kepada kinerja yang ada relevansi dengan tugas pokok dan fungsinya.

“Bagaimana konsekuensi dari keuangan negara terhadap tugas koordinasi, tugas supervisi, tugas penyelidikan, tugas penyidikan, tugas penuntutan itu yang kami mintakan kepada BPK secara keseluruhan. Dan ternyata dari hal-hal tersebut, kami menemukan banyak hal yang perlu ditindak lanjuti. Diantaranya adalah tentang

keberadaan SDM di KPK yang kami juga perlu melakukan langkah-langkah lanjutan, yang tidak bisa secara spesifik, kami putuskan berdasarkan hasil pertemuan kami dengan BPK, karena ada sejumlah undang-undang lain yang mengaturnya,” jelas anggota dewan dapil Jawa Barat.

Terkait hal tersebut, Pansus Hak Angket KPK juga akan meminta saran dan pandangan dari Menpan dalam kaitannya dengan UU Aparat Sipil Negara. Termasuk pula soal intersepsi UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi ITE yang berkaitan dengan masalah penyadapan.

“Apakah penyadapan-penyadapan yang dilakukan seperti ini juga sudah memiliki landasan hukum yang cukup. Nah, ini pun kami akan dalam lebih jauh, mungkin kami akan menemui Kominfo, termasuk juga mungkin ke berbagai provider. Tidak ada yang kita tutupi, semangatnya bukan untuk kepentingan A, B, C apalagi sampai kepentingan Z, kami tidak melihat kepentingan itu semua. Marilah kita sama-sama untuk meyakini secara objektivitas, keterbukaan, jauhi dan hindari dari kecuriga-an, awali dengan itikad yang baik,” tegas Agun.

“Kita ingin menata sebuah pola kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang baik, Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lagi menimbulkan tanda tanya ataupun salah sangka yang sampai membuat penyerapan anggaran semakin rendah. Yang mengakibatkan orang akan menjadi semakin ragu melaksanakan anggaran,” pungkasnya. ■

(dep/sc) Foto: Arief/hr

Kedatangan Obama Dongkrak Pariwisata Indonesia

Kunjungan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia untuk liburan ke Bali, Yogyakarta dan Bogor diyakini kalangan DPR akan mendongkrak kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (06/07/2017).

“Kedatangan Obama ke Bali, Yogya dan Bogor untuk liburan menjadi promosi gratis bagi wisata tanah air, dan ini akan menambah minat wisman kepada pariwisata Indonesia,” ucap Sutan Adil Hendra.

Hal itu diyakini Sutan berdasarkan fakta bahwa presiden ke 44 USA merupakan tokoh yang memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Terbukti sampai hari ini aplikasi media sosial Twitter presiden obama di ikuti hampir satu milyar pengikut

aktif di seluruh dunia, dan follower ini selalu melihat dan mengomentari aktivitas Obama. Bahkan jumlah pencarian di Google tentang Bali dan Yogya juga meningkat hampir 30 kali lebih banyak dibanding biasanya.

“Sejak liburan Obama ke Bali dan Yogya, trafik pencarian Google tentang daerah tersebut mengalami peningkatan luar biasa. Momentum ini seharusnya dijadikan peluang untuk promosi wisata tanah air selain Bali, karena dunia juga



Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra

harus tahu potensi wisata Indonesia seperti danau Toba, Belitung, Raja Ampat dan lain sebagainya,” ujarnya

“Sehingga target pemerintah untuk mendatangkan 20 juta wisatawan 2019 ini bisa tercapai demi peningkatan ekonomi nasional. Malaysia saja bisa 22 juta wisman pertahun, Indonesia seharusnya bisa lebih,” tandas politisi F- Gerindra itu. ■

(dep.mpi) Foto: Arief/hr

Pemotongan Anggaran BMKG Ganggu Kinerja



Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis

Pemotongan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengganggu kinerja badan tersebut dalam mendeteksi cuaca dan iklim di Indonesia. Pemotongan ini jadi sorotan tajam Komisi V DPR RI.

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis langsung menyoroti pemotongan anggaran BMKG sebesar 40 persen pada tahun anggaran 2017 ini. Apalagi, isu pemotongan ini dikaitkan dengan insiden jatuhnya helikopter HR 3602 milik Basarnas saat melakukan operasi SAR di Kabupaten Temanggung, pekan lalu. Kecelakaan tersebut bisa saja terkait dengan prediksi cuaca hari itu.

“Ada pemotongan anggaran instrumen cuaca di BMKG. Kami harap BMKG tidak serta-merta menerima saja jika ada pemotongan,” papar Fary dalam Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Basarnas, dan BMKG di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/07/2017).

Fary mengungkapkan, berdasarkan informasi yang didapat, BMKG melaporkan kondisi cuaca saat itu clear dengan jarak pandang 8 km dan kecepatan angin rata-rata 9-19 km/jam. Sementara laporan

dari masyarakat setempat, saat kejadian kondisi cuaca hujan dan berkabut. “Kita masih menunggu penyebab kecelakaan dari hasil pemeriksaan KNKT, tetapi sementara kami menduga pemotongan anggaran ini mengganggu kerja dalam mendeteksi cuaca dan iklim,” jelas politisi dari F-Gerindra ini.

Selanjutnya menurut Fary, Komisi V akan merekomendasikan pembentukan Panja khusus untuk mengaudit peralatan instrumen cuaca BMKG, apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Peremajaan peralatan informasi dan instrumen yang ada untuk mendeteksi perubahan cuaca sangat penting dalam membantu mencegah kecelakaan serupa.

Sementara itu, Kepala BMKG Andi Eka Sakya, membenarkan adanya pemotongan anggaran khusus untuk beberapa perawatan instrumen termasuk instrumen cuaca yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja BMKG. Dirinya berjanji akan memperbaiki proses pemeliharaan peralatan instrumen BMKG. “Soal perawatan kami usahakan untuk diperbaiki. Sebelumnya pun kami sudah usaha mencari dukungan dari luar untuk perawatan,” tuturnya. ■

(ann) foto: kresno/hr



Gali Data Kecelakaan Helikopter, Komisi V Datangi Kantor SAR Semarang

Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor SAR Semarang, Jawa Tengah, Selasa (04/7/2017), guna menggali informasi dan mengetahui secara mendalam terkait kecelakaan helikopter milik Basarnas di Temanggung, Jateng, Minggu (02/7/2017) lalu. Kecelakaan naas itu menyebabkan meninggalnya delapan korban.



Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis

“Kami ingin mendalami beberapa informasi, seperti kondisi cuaca saat itu, dan penghargaan yang diberikan kepada anggota penyelamat yang meninggal itu,” Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis, saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR. Dalam kesempatan itu, sejumlah Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR menyampaikan sejumlah pertanyaan dan masukan.

Politisi F-Gerindra itu menjelaskan, helikopter buatan Perancis itu dibeli pada 2012 lalu dan dirakit oleh PT. Dirgantara Indonesia. “Kontrak pembelian langsung dengan PT. Dirgantara Indonesia dan menggunakan anggaran APBN 2012-2013 dan dioperasikan 2015. Informasi yang kami terima helikopter itu belum melewati 600 jam terbang,” jelas Fary.

Namun, politisi asal dapil NTT itu mengingatkan agar berbagai pihak tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan penyebab kecelakaan. Pihaknya meminta agar menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Menanggapi berbagai pertanyaan dan

masukan, Deputi Bidang Potensi Basarnas Marsda Dody Trisunung mengatakakan helikopter jenis Dauphin yang mengalami kecelakaan tersebut dalam kondisi siap terbang. Helikopter tersebut disiagakan di tol darurat Gringsing selama arus mudik dan balik Lebaran

2017.

“Helikopter mendapat perintah untuk mengangkut tim penyelamat untuk membantu proses evakuasi kejadian letusan Kawah Sileri di Dieng,” jelas Dody.

Dody menambahkan, helikopter tersebut diperintahkan ke Dieng untuk membantu jika sewaktu-waktu diperlukan evakuasi melalui udara akibat letusan Kawah Sileri. Ia memastikan, keempat anggota Basarnas yang gugur tersebut memiliki kualifikasi untuk melakukan penyelamatan dengan menggunakan helikopter.

Dalam kesempatan yang sama, General Manager Air Nav Indonesia Cabang Semarang, Kristanto mengatakan kepastian helikopter milik Basarnas itu setelah adanya konfirmasi dari seorang anggota TNI di Kabupaten Pemalang. Setelah lost contact pada pukul 16.20, Air Nav berusaha memanggil.

“Kami panggil tak ada jawaban, kemudian kami coba hubungi stasiun kami di Solo dan Jogja bahkan Jakarta yang pelayanan dengan SS juga tak ada kontak dengan heli. Akhirnya kami

dapat informasi dari rekan di Pemalang helikopter menabrak tebing,” jelas Kristanto.

Sementara itu, Kepala BMKG Ahmad Yani Semarang, Bayu Umbaran memastikan cuaca saat penerbangan helikopter jenis Dauphin milik Badan SAR Nasional dalam kondisi clear. Hal itu berdasarkan observasi stasiun Ahmad Yani yang menunjukkan kondisi cuaca berawan kecepatan angin 9 hingga 15 kilometer per jam.

Berdasarkan analisis citra satelit pada pukul 16.00 - 17.00 WIB, keadaan cuaca pada ketinggian 1.000 hingga 6.000 meter di Pengunungan Sindoro juga berawan kecepatan angin 9 hingga 19 kilometer per jam arah timur laut tenggara. “Sekitar Sindoro dalam keadaan clear, begitu pula dari Gringsing hingga Gunung Sindoro,” imbuh Bayu.

Sebagaimana diketahui, helikopter Basarnas jenis Dauphin mengalami kecelakaan di Gunung Butak, Desa Canggal, Kecamatan Candiroto, Temanggung, Minggu (02/7/2017) lalu. Pesawat yang sedianya melakukan pantauan udara dan memberikan bantuan pada saat meletusnya Kawah Sileri di Dieng, mengalami hilang kontak pukul 16.17 WIB. Delapan orang menjadi korban kecelakaan naas ini, yang terdiri dari empat kru helikopter, dan empat anggota tim SAR.

Kunjungan kerja spesifik ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus (F-PDI Perjuangan) dan Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena (F-PD), serta diikuti oleh beberapa Anggota Komisi V DPR, diantaranya Yoseph Umarhadi (F-PDI Perjuangan), Daniel Mutaqien Syafiuddin (F-PG), Gatot Sudjito (F-PG), Subarna (F-Gerindra).

Kemudian Novita Wijayanti (F-Gerindra), Umar Arsal (F-PD), Syahrulan Pua Sawa (F-PAN), Alamuddin Dimiyati Rois (F-PKB), Nurhayati (F-PPP), Nurhasan Zaidi (F-PKS), Soehartono (F-Nasdem), Djoni Rolindrwan (F-Hanura).

Dalam rangkaian kunjungan ini, Komisi V DPR juga melawat ke kediaman Budi Restiyanto, yang menjadi salah satu korban kecelakaan helikopter itu. Komisi V DPR memberikan santunan kepada istri dan anak almarhum Budi. ■

(si/sc) foto: sofyan/hr

Sidang Parlemen Eurasia di Seoul Hasilkan 10 Pernyataan

Sidang Meeting of Speakers of Eurasian Countries Parliaments (MSEAP) yang ke-2 di Seoul, Korea Selatan dari tanggal 26-28 Juni 2017 menghasilkan 10 pernyataan tentang perdamaian, ekonomi, stabilitas dan kemakmuran bersama melalui pembangunan berkelanjutan.



Anggota BKSAP Sartono Hutomo dalam Sidang MSEAP ke-2 di Seoul Korea Selatan.

Menurut anggota BKSAP Sartono Hutomo (F-PD) usai penutupan sidang mengatakan didalam second meeting off speaker Eurasia beberapa usulan parlemen Indonesia di akomodir didalam ke sepuluh pernyataan forum ini.

“ Usulan-usulan dari Indonesia di akomodir didalam pernyataan hasil akhir dalam 2nd Eurasia speaker meeting ini, seperti usulan kita yang concern terhadap SDGs (Sustainable Development Goals) 2030, penguatan legislasi parlemen, dan usulan tidak adanya diskrimasi dalam forum ini,” jelas Sartono.

Memang, lanjutnya, meski pernyataan ini tidak mengikat namun idealnya dengan kebijakan yang sesuai dengan itu untuk tetap dilanjutkan.

Berikut salah satu isi dari 10 Seoul Statement. Dengan berbagi pandangan bahwa kemakmuran bersama di kawasan Eurasia dapat memberi kontribusi pada kemakmuran di belahan dunia lain, MSEAP sepakat untuk melipatgandakan

usaha untuk mendukung peran dan fungsi parlemen dalam mandat mereka dan memperluas kerja sama antar parlemen untuk berkontribusi terhadap kemakmuran bersama di wilayah dan sekitarnya.

MSEAP memperhatikan bahwa keragaman politik, ekonomi, sosial dan budaya di wilayah Eurasia dapat menjadi kekuatan pendorong di balik kemakmuran bersama, MSEAP mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030 serta menggarisbawahi bahwa pencapaian mereka dapat membawa kekayaan dan stabilitas kepada daerah, dan bersepakat untuk merangsang dialog dan berkontribusi dalam membangun kepercayaan dan saling pengertian.

MSEAP pun mengakui pentingnya

pengembangan kawasan Eurasia sebagai sebuah komunitas, kami berjanji untuk memberikan upaya bersama dalam hal dukungan legislatif dan institusi untuk mempromosikan kerja sama di berbagai bidang demi kepentingan bersama, untuk saling menguntungkan, seperti logistik, konektivitas, jaringan, infrastruktur, pertukaran orang-ke-orang, sumber daya, energi dan ekonomi digital dengan memperhatikan legislasi masing-masing negara.

Dalam pernyataan ini juga mengakui kebutuhan parlemen di wilayah kita untuk merespons secara aktif tantangan yang dihadapi masyarakat Internasional, seperti terorisme internasional, ekstremisme kekerasan, perdagangan narkoba, kejahatan transnasional, perubahan iklim, degradasi lingkungan, kemiskinan, segala bentuk ketidaksetaraan, dan isu-isu yang berkaitan dengan pengungsi. MSEAP mendukung kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Inter-Parliamentary untuk menghadapi tantangan global dan perlunya parlemen kita untuk mengambil perhatian dan melakukan usaha bersama dalam hal ini.

Dalam sidang MSEAP ke-2 di Seoul yang bertajuk Promoting or Interparliamentary Cooperation for Common Prosperity the Euro Asian Region, delegasi Parlemen Indonesia di pimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah didampingi anggota BKSAP Nurhayati (F-PPP) dan Sartono Hutomo (F-PD). ■

(nt), foto : nita juwita/hr

Implementasi Kebijakan Jadi Masalah Besar Dunia Pendidikan Indonesia

Masalah pendidikan di Indonesia lebih banyak pada persoalan implementasi kebijakan, yang mungkin di tingkat kementerian sudah bagus, tetapi dengan adanya otonomi pendidikan itu maka tentu masalah paling besar adalah pada tingkat implementasi.



Anggota Komisi X DPR RI Nuroji

Demikian dikatakan Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat rapat dengar pendapat umum Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/07/2017).

“Banyak kebijakan yang sudah bagus tetapi ditingkat daerah tidak dilaksanakan. Misalkan pemahaman daerah terhadap SNP, kemudian juga tentang tindak lanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta soal kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ucap Nuroji.

Adakah Kementerian terkait memiliki alat ukur kinerja para kepala daerah dalam hal pembangunan pendidikan, meskipun pada rapat sebelumnya Dirjen Kemendikbud mengatakan dengan cara akreditasi.

“Saya pikir hal itu tidak cukup, kalau cuma akreditasi maka hal ini sudah disampaikan. Untuk menjaga agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu tinggi antar daerah karena masing-masing punya kemampuan dan kemauan yang berbeda pada setiap kepala daerah, maka perlu ada kebijakan yang lebih ekstrim yang mengatur mekanisme dari pemerintah pusat ke daerah, yakni kepada para kepala daerah, untuk memberikan sanksi dan reward bagi pembangunan pendidikan ini,” tegasnya.

Ia meyakini bahwa banyak daerah yang punya perhatian cukup besar, tetapi banyak juga daerah yang kepala daerahnya tidak paham terhadap pendidikan.

“Maka kalau kita lihat pengukuran dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) ini, rata-rata ada di masalah sarpras yang sangat rendah, yang berkaitan dengan tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini berkaitan dengan kemampuan dan kemauan. Banyak daerah yang punya uang banyak tetapi tidak mau perhatian pada pendidikan, namun banyak juga daerah yang tidak punya uang. Ini mungkin salah satu kelemahan otonomi pendidikan kita” pungkaskannya. ■

(dep/sc) Foto: Arief/hr

Komisi VIII Tinjau Dampak Bencana Kawah Sileri Dieng

Komisi VIII DPR RI yang membidangi penanggulangan bencana, saat ini sedang meninjau lokasi Kawah Sileri Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah untuk meninjau Pos Bencana Dieng.



Anggota Komisi VIII Khotibul Umam Wiranu saat kunspek ke Dieng Jawa Tengah

“Komisi VIII melakukan pengawasan untuk melihat dampak fisik dan non fisik dari bencana itu. Dampak fisik seperti gunung meletus atau banjir yang terkadang menimbulkan korban sedangkan non fisik seperti Dieng ini yang berbahaya adalah asap beracun,” kata Anggota Komisi VIII Khotibul Umam Wiranu dalam perjalanan ke Dieng, Jawa Tengah, Selasa (04/7/2017).

Menurutnya, untuk masalah bencana Dieng ini harus bekerjasama dengan ahli vulkanologi yang mengerti tentang gunung berapi dan asap beracun. “Selain itu, kita ingin BNPB juga punya program khusus untuk Dieng ini, karena Dieng ini banyak ditinggali oleh masyarakat Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara,” ujarnya.

Walaupun kawah Dieng ini pernah menimbulkan bencana besar dan terakhir ini menimbulkan korban luka 20 orang, masyarakat sekitar kawasan Dieng masih sulit untuk direlokasi. Ini menyangkut tradisi mereka menganggap tanahnya

merupakan tanah dari nenek moyang, sehingga untuk melakukan evakuasi dan relokasi tidak mungkin. “Oleh karena itu cara peringatan dini dari ahli-ahli vulkanologi ini menjadi penting,” ujarnya.

Seperti kemarin, lanjut politisi PKB ini, BNPB dinilai memberikan informasi sangat telat mengenai pelarangan kawasan wisata mulai tanggal 14 Juni, yang tidak massive dan tidak tersosialisasikan dengan baik.

Selain itu, BNPB wilayah provinsi dan kabupaten problemnya adalah tidak mempunyai alat yang cukup baik untuk mendeteksi berbagai macam bencana termasuk tanah longsor dan gas-gas beracun, yang punya adalah pusat namun pusat selalu terlambat

“Oleh karena itu, Komisi VIII akan mendorong tambahan anggaran untuk pengadaan alat-alat teknologi yang tujuannya untuk memberikan peringatan dini di kawasan-kawasan pegunungan rawan bencana seperti di Dieng ini,” ungkap Khotibul Umam. ■

(ae/sc), foto: egung/hr



Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf menerima Duta Besar Qatar Ahmad Bin Jassim Mohammed Ali Al-Hamar

Indonesia Diharapkan Proaktif Mediasi Konflik Di Kawasan Teluk

Hubungan Indonesia dan Qatar tidak hanya sebatas hubungan diplomatik. Sebagai sesama negara muslim, kedua negara memiliki kedekatan emosional. Sebab itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri diharapkan proaktif melakukan mediasi terhadap konflik yang sedang memanas di negara Kawasan Teluk.

Demikian ditegaskan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf usai menerima Duta Besar Qatar Ahmad Bin Jassim Mohammed Ali Al-Hamar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

“Kita minta Kemenlu agar aktif dalam melakukan mediasi konflik di Timur Tengah, misalnya dengan melakukan lobi atau mengadakan pertemuan dengan negara terkait untuk duduk satu meja,” ungkap Nurhayati yang juga anggota Komisi I DPR ini.

Lebih lanjut, politisi F-Demokrat itu mengatakan, bentuk mediasi yang ditawarkan bisa berupa jalur diplomasi maupun komunikasi politik. Mengingat,

Qatar masih tergabung dalam Gulf Country Continent (GCC). Apalagi, sambungnya, Qatar sangat aktif dalam membantu masalah kemanusiaan.

“Kita tidak ada keberpihakan terhadap negara tertentu, tetapi kita mencoba kembali menyatukan apa yang sedang terjadi di negara GCC ini. Banyak yang sudah dilakukan Qatar untuk kemanusiaan, dan itu harus diekspos,” jelasnya.

Meskipun hubungan Qatar-Indonesia tidak terganggu dengan adanya konflik ini, namun dirinya berharap GCC segera menemukan solusi. Sehingga tidak memengaruhi investasi negara Arab di Indonesia, seperti saham Indosat yang mayoritas dimiliki Qatar.

“Peran Indonesia untuk mediator sangat diharapkan, seperti yang sering kita lakukan di Asean,” tandas politisi asal dapil Jawa Timur itu, sembari menekankan bahwa diplomasi dan mediasi itu diharapkan dapat menguntungkan kedua negara.

Dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu, Dubes Qatar menyampaikan bahwa ia baru saja bertemu dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla untuk membahas konflik di Kawasan Teluk. Dubes tidak membenarkan anggapan bahwa Qatar mendukung serta melindungi kelompok-kelompok ekstrem. Meskipun demikian, Qatar dan Iran merupakan negara tetangga sejak lama, sehingga tidak mungkin menjauhi Iran.

Dubes Qatar juga memberikan apresiasi dan sangat menghargai upaya yang dilakukan Indonesia untuk menjadi mediator. Menurutnya, Qatar siap untuk melakukan perundingan dan negosiasi yang dilakukan tanpa syarat dan tekanan. ■

(ann.s/f), foto: arielfhr



Ketua DPR Berharap Deputi Administrasi Setjen DPR Mampu Bersinergi dengan Berbagai Stakeholder

Ketua DPR RI Setya Novanto berharap Deputi Administrasi DPR RI yang baru saja dilantik dapat menjembatani dan mengoperasionalkan kebijakan dan program pimpinan, Setjen, dan Badan Keahlian DPR RI. Hal tersebut diungkapkannya dalam sambutan usai melantik Mardian Umar sebagai Deputi Administrasi Setjen DPR RI di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (5/7) malam.

“Dalam hal ini Deputi administrasi harus mampu mencerna, mengolah, dan merealisasikan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka menunjang tercapainya kinerja DPR RI. Selain itu juga dituntut untuk mampu membangun kerja sama dan sinergi dengan berbagai stakeholders lainnya, baik yang ada di lingkungan Setjen dan BKD,” ujar Novanto.

Ia menyadari bahwa tantangan dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada deputi administrasi

sangat berat. Namun ia berharap Deputi administrasi yang baru saja dilantik mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan optimal. Sementara itu Deputi Administrasi terlantik, Mardian Umar mengatakan bahwa tugas dan jabatan yang baru saja diembankan kepadanya merupakan amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya. Ia juga berharap dukungan, doa, dan kerja sama dari semua elemen baik di Setjen DPR RI maupun Badan keahlian DPR RI.

“Sebagaimana harapan dari Pimpinan

DPR tadi saya berusaha untuk menjalankan sebaik-baiknya tugas dan jabatan yang diembankan kepada saya. Untuk itu saya berharap dukungan, doa, dan kerja sama dari semuanya baik di Setjen DPR RI maupun BK DPR RI. Jika ditanyakan langkah-langkah apa saja yang akan saya ambil ke depan, tentu yang pertama kali akan saya lakukan adalah menggelar koordinasi dengan deputi lainnya, serta meminta arahan dari pimpinan kami, yakni Sekjen DPR RI,” papar Mardian.

Pada kesempatan itu hadir Pimpinan DPR RI lainnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Pimpinan BURT DPR RI Roem Kono, Agung Budi Santoso, Novita Wijayanti, Pimpinan Komisi X DPR RI Ferdiansyah, Sekjen DPR RI Achmad Djuned, Kepala BKD Johnson Radjaguguk, Deputi Persidangan Damayanti, serta beberapa pejabat eselon II, III, dan IV yang ikut menyaksikan upacara pelantikan tersebut.

Tidak hanya itu hadir pula, Wakilpolda Metro Jaya Brigjen Suntana, serta beberapa Sekjen DPR pada periode terdahulu seperti Winantuningtyastiti, Nining Indra saleh, Faisal Djamal, dan pegawai juga karyawan-karyawati di jajaran Setjen DPR RI yang turut menyaksikan upacara pelantikan sekaligus memberikan ucapan selamat. ■

(Ayu), Foto: Rumi/hr.



Ketua DPR RI Setya Novanto saat melantik Mardian Umar sebagai Deputi Administrasi Setjen DPR RI



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Ketua Panja RUU KUHP dan KUHP DPR RI Benny K. Harman, Ketua Asosiasi Hukum Pidana KUHP dan KUHP Profesor Andi Hamzah, Pakar Hukum Pidana Profesor Syaiful Bakhrri, dan DR. Eva Achjani Zulfa dalam Diskusi Solusi Nasional dengan tema Quo Vadis RUU KUHP dan KUHP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (06/07/2017). Foto: jayadi/hr

Kunjungan Kerja Komisi V DPR ke Kantor SAR Semarang, Jawa Tengah terkait jatuhnya Helikopter jenis Dauphin milik Basarnas yang mengalami kecelakaan di Temanggung dipimpin Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis, Selasa (4/7/2017) Foto: Sofyan/hr



Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR meninjau lokasi bencana letupan Kawah Sileri Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah dipimpin Ketua Komisi ALi Taher Parasong, Selasa (04/7/2017) Foto: Agung/hr